

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki sekitar 17.508 pulau dan panjang garis pantai lebih dari 81.000 km, hal ini tentu membuat negara Indonesia memiliki sumberdaya alam laut dan pesisir yang melimpah salah satu sumberdaya laut dan pesisir tersebut adalah hutan mangrove yang tersebar di hampir seluruh garis pantai. Mangrove merupakan ekosistem dengan fungsi yang unik dalam lingkungan hidup. Keunikannya adalah fungsi serbaguna hutan mangrove sebagai sumber penghasilan masyarakat desa di daerah pesisir, tempat berkembangnya biota laut tertentu dan flora-fauna pesisir, serta dapat dikembangkan sebagai wanawisata untuk kepentingan pendidikan dan penelitian. Namun semakin hari semakin kritis ketersediaannya di beberapa daerah pesisir di Indonesia sudah terlihat adanya degradasi hutan mangrove akibat dari pemanfaatan hutan mangrove oleh penduduk tersebut tidak semuanya dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah, banyak pemanfaatan yang cenderung berlebihan sehingga dapat merusak hutan mangrove, hal inilah yang menyebabkan terjadinya penurunan jumlah luas lahan hutan mangrove sehingga berdampak pada kerusakan lingkungan pesisir.

Keadaan luas hutan mangrove Indonesia 7.758.410,59 ha, dengan perincian: dalam keadaan baik seluas 2.327.523,177 ha dan dalam keadaan rusak 5.430.887,413 ha (Kemenhut, 2007). Kerusakan hutan mangrove ini disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia. Namun pada umumnya kerusakan hutan ini

disebabkan oleh aktivitas penduduk yang memanfaatkan hutan mangrove yang di gunakan untuk berbagai kepentingan, seperti; penebangan untuk keperluan pemukiman, tambak, perkebunan, pembuatan arang.

Tak jauh berbeda dengan keadaan luas hutan mangrove di Sumatera Utara, di daerah tersebut terdapat 347.435,70 Ha hutan mangrove yang dalam kondisi baik 35.995,83 Ha, dan dalam kondisi rusak 311.439,87 Ha, yang menyebar di berbagai kabupaten, meliputi ; kota Sibolga dan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Labuhan Batu, Nias, Deliserdang, Serdang Bedagai, Mandailing Natal, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, serta Langkat (BPHM wilayah II). Di beberapa daerah wilayah pesisir kabupaten langkat sudah terlihat adanya degradasi dari hutan mangrove akibat penebangan hutan yang melampaui batas kelestariannya. Hutan mangrove telah berubah menjadi tempat berbagai kegiatan penduduk untk keperluan pemukiman, pertambakan, perkebunan, pertanian dan industri. Hal seperti ini terutama terdapat di kecamatan Pangkalan susu yang merupakan salah satu kecamatan di kabupaten langkat yang memiliki daerah hutan mangrove.

Salah satu wilayah di Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat adalah Kelurahan Beras Basah, kelurahan ini berada di daerah pesisir pantai yang memiliki hutan mangrove di sepanjang garis pantainya. Namun kondisi hutan di kelurahan ini mengalami penurunan luas hutan sehingga pada tahun 2011 kelurahan ini memiliki 300 Ha hutan mangrove. Dengan perincian 100 hektar luas hutan berada dalam kondisi baik dan 100 hektar lagi berada pada kondisi rusak (kantor Kelurahan Beras Basah). Kerusakan hutan mangrove yang terjadi di Kelurahan Beras Basah ini dimungkinkan terjadi karena banyaknya pemanfaatan-

pemanfaatan yang dilakukan secara berlebihan oleh penduduk terhadap hutan mangrove di daerah tersebut. Mengenai permasalahan kerusakan ini telah mendapatkan perhatian yang serius dari pihak pemerintah Kelurahan Beras Basah sehingga diadakannya upaya-upaya pelestarian hutan mangrove. Sehubungan dengan itu perlu dikaji bagaimana pemanfaatan hutan yang dilakukan penduduk di Kelurahan Beras Basah.

### **B. Identifikasi Masalah**

Sesuai latar belakang masalah, yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah adanya pemanfaatan hutan mangrove yang dilakukan oleh penduduk. Adapun pemanfaatan itu mencakup dalam hal pertambangan dan pemukiman, pemukiman, pembuatan arang, perkebunan, pertanian, dan industri sehingga berakibat pada penurunan jumlah luas hutan mangrove. Sehubungan dengan itu pemerintah daerah melakukan upaya pelestarian terhadap hutan mangrove.

### **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah, maka masalah dalam penelitian ini dibatasi pada pemanfaatan hutan mangrove. Adapun pemanfaatan yang dilakukan oleh penduduk mencakup pada pertambangan, pemukiman, pembuatan arang dan perkebunan. serta upaya pemerintah dalam melestarikan hutan mangrove.

#### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pemanfaatan hutan mangrove (pertambakan, pemukiman, pembuatan arang dan perkebunan) yang dilakukan penduduk di Kelurahan Beras Basah.
2. Bagaimana upaya pemerintah dalam melestarikan hutan mangrove di Kelurahan Beras Basah.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemanfaatan hutan mangrove (pertambakan, pemukiman, pembuatan arang, dan perkebunan) yang dilakukan penduduk di Kelurahan Beras Basah
2. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam melestarikan hutan mangrove pelestarian di Kelurahan Beras Basah.

## F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:

1. Sebagai bahan masukan bagi Dinas Kehutanan di Kabupaten Langkat, dan kantor Kelurahan Beras Basah Kecamatan Pangkalan Susu dalam mengambil kebijakan mengenai hutan mangrove.
2. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat yang berdomisili di Kelurahan Beras Basah.
3. Untuk menambah wawasan bagi peneliti dalam menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi.
4. Sebagai bahan pembandingan bagi peneliti lain untuk meneliti masalah yang sama pada daerah yang berbeda